

# KESENJANGAN SOSIAL: KOLONIALISME PENDIDIKAN MENGIKIS TERWUJUDNYA WELFARE STATE

Oleh

Retno Dewi Pramodia Ahsani

Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRAK

*Pendidikan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan satu masyarakat di satu negara. Dewasa ini, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat membuka jurang pemisah yang dalam untuk masyarakat menjangkaunya. Tingginya biaya pendidikan membuktikan bahwa pendidikan telah dikomodifikasi oleh negara, dan negara selalu "membuang muka" ketika masyarakat tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Atas kondisi komodifikasi pendidikan, maka masyarakat yang berada dalam kelompok yang kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dikarenakan biaya yang tinggi. Atas kondisi ini, negara seharusnya hadir memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, sebagai bentuk implementasi amanah konstitusi.*

**Kata Kunci :** Pendidikan, Kesejahteraan, Negara, Kesenjangan Sosial

## PENDAHULUAN

*Welfare state*<sup>1</sup> istilah yang tidak asing lagi kita dengar. Ketika kita mendengar *welfare state*, maka pasti yang terlintas dibenak kita terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu negara kemakmuran atau negara kesejahteraan. Dalam mengukur apakah suatu negara itu tergolong dalam *welfare state*, kita dapat merujuk pendapat Esping-Andersen negara

kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada, "peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian" yang didalamnya "mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya" (Triwibowo dan Bahagijo, 2006: 9). Pada umumnya negara dapat dikatakan sebagai negara kesejahteraan apabila memenuhi empat pilar, yaitu: (i) *social citizenship*; (ii) *full democracy*; (iii) *modern industrial relation systems*; serta (iv) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Ketika dari keempat pilar terpenuhi maka suatu negara dapat dikatakan *welfare state*. Yang menjadi

---

<sup>1</sup> Terminologi *welfare state* pertama kali digunakan oleh William Temple (1881-1944) dalam bukunya *Citizen and Cruch men* (1941). *Welfare state* adalah negara yang membuat ketetapan substansial untuk membantu kelompok-kelompok yang kurang mampu. Dalam kelompok ini misalnya termasuk orang-orang sakit, miskin, tua dan cacat. Lihat Roger Scruton, *A dictionary of politically thought* (London: The Macmillan Press, 1982) hal.493

pertanyaan kita bagaimana sebenarnya keadaan di Indonesia? Dengan lantang dapat kita jawab bersama, bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan. jawaban pertanyaan tadi bukan jawaban tanpa dasar yang kuat, sebab dari landasan negara telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan” sepenggal kutipan tadi mengisyaratkan bahwasanya negara kita merupakan negara kesejahteraan.

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang dalam sepenggal kalimatnya mengucapkan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya keadaan pendidikan Indonesia saat ini, ketika telah mengecap kemerdekaan selama 66 tahun 4 bulan 29 hari? Pertanyaan ini akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini.

## SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA

Sekolah pertama kali berdiri di Indonesia adalah sekolah yang ditujukan untuk anak-anak belanda. Sekolah pertama yang dibuat untuk anak belanda berada di Jakarta pada

tahun 1817 (Nasution, 2001:9) Perkembangan pendirian sekolah yang ditujukan untuk anak belanda ini mengalami perkembangan yang bisa dikategorikan cepat, perkembangannya dapat kita lihat pada tabel berikut.

**Table. 1.**  
**Pertumbuhan Sekolah**

Tahun	Jumlah Sekolah
1817	1
1820	7
1835	19
1845	25
1957	57

*Sumber.* Nasution, 2001

Setelah adanya sekolah anak belanda, kemudian muncullah sekolah untuk kaum pribumi. Peraturan mengenai sekolah pribumi tertuang dalam statuta 1818 yang menyatakan “pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumi putera. Berdasarkan statuta pada tahun 1818 Pemerintah hanya bertanggung jawab menyediakan peraturan tanpa kewajiban menyediakan sekolah. Ketika statuta itu berlaku para kaum pribumi dapat bersekolah disekolah belanda, tidak dapat dielakkan lagi didalam kenyataannya anak pribumi hanya menjadi kaum minoritas ditengah mayoritas kaum belanda. Dalam catatan komisi pendidikan pemerintah kolonial pada tahun 1847 tercatat hanya ada 37 anak-anak bukan kristen anak pribumi diantara 1700 murid disekolah belanda. Didalam proses penerimaan murid

yang tidak berasal dari anak belanda, maka dalam penerimaan muridnya harus melalui perundingan terlebih dahulu.

Pada tahun 1852 mulai dibuka sekolah pendidikan guru dan pada tahun 1879 mencapai 10 lembaga. Menginjak tahun 1870 ekonomi memburuk, makin banyak keterlibatan pemerintah untuk membuka daerah bagi usaha swasta (Nasution, 2001: 11). Pemerintah kolonial belanda terlibat dalam peperangan yang berlangsung lama dalam kurun waktu 39 tahun, seiring dengan adanya peperangan di aceh membuat pemerintah kolonial harus menguras jutaan gulden dan secara otomatis berimbas pada seluruh sistem ekonomi. Namun keadaan yang sangat memukul pemerintah belanda ketika terjadinya krisis gula pada tahun 1884 dan 1893. Harga gula, komoditi ekspor yang paling utama, diakibatkan penyakit tebu dan diadakannya penghematan ketat. Situasi ini membuat pemerintah kolonial mengambil kebijakan, salah satunya adalah memangkas gaji guru secara drastis. Kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah kolonial menyerahkan saja pendidikan ke tangan swasta untuk meringankan pemerintah dari beban finansial.

Pemerintah kolonial pada dasarnya tidak pernah meragukan akan perlunya pendidikan bagi anak pribumi terutama pada kalangan ningrat. Sehingga timbullah ide untuk menyediakan pendidikan bagi anak aristokrasi dan orang kaya yang berbeda dengan pendidikan untuk orang biasa. Ketika itu terjadi maka akan diikuti

dengan daya tukar yang mahal dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan sistem yang berbeda antara anak aristokrasi dan orang kaya dengan anak-anak pribumi biasa. Dari pernyataan sebelumnya menimbulkan pertanyaan Apakah gambaran pendidikan era reformasi saat ini telah beranjak keluar dari sejarah pendidikan dimasa lalu?

### **GAMBARAN PENDIDIKAN ERA REFORMASI**

Berbicara mengenai pendidikan di era reformasi terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar hukum yang berlaku. Sesuai dengan amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) menyatakan:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.
3. Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kutipan amandemen diatas mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan menyongsong kemajuan suatu bangsa. Namun, ironinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu menghembuskan kegelisahan ditengah

masyarakat. Menurut Tilaar (Saksono, 2008:104), biang keladi dan kekacauan perencanaan pendidikan belum mempunyai visi pembangunan yang jelas. Dalam RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang disampaikan Presiden ke DPR merumuskan sasaran pokok dalam 20 tahun mendatang antara lain terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat sejahtera. Padahal dalam nilai-nilai pancasila didalam UUD 1945 bukan menekankan pada persaingan, tetapi kebersamaan dalam kebersamaan akan tercipta daya saing sebagai bangsa (Saksono, 2008:105).

Ketika menelaah sepenggal pernyataan dari adanya daya saing menimbulkan pertanyaan besar daya saing semacam apa? Daya saing antar sesama anak bangsa atau daya saing terhadap bangsa lain sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Kini pada pelaksanaannya apabila menggunakan paradigma yang mendasari Renstra tersebut adalah neoliberalisme sehingga pada titik dasar epistema yang ada sesuai dengan Renstra berdasarkan epistema ekonomi dan politik, bukan berdasarkan epistema pedagogis. Penyusunan Renstra yang ada dengan jelas menggunakan paradigma ORBEX (*Organizing fo Business Excellent*). Pendidikan dianggap sebagai suatu organisasi bisnis yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*Profit*) dalam

jangka waktu yang cepat. Kalau paradigma diatas dijadikan arah dari pendidikan nasional maka dapat diprediksikan dengan jelas semakin menjauh dari landasan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan kata lain Renstra Departemen Pendidikan Nasional tidak diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak yang miskin tetapi melahirkan suatu sistem pendidikan yang liberalistis.

Menurut Sofian Effendi, dalam pelaksanaannya terjadi deviasi antara ketentuan konstitusional dengan pelaksanaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pada orde Reformasi hubungan negara dan masyarakat dalam bidang pendidikan mengalami perubahan yang cukup besar dan telah menyimpang dari ketentuan konstitusi. Karena pengaruh globalisasi yang ditunggangi oleh semangat fundamentalisme pasar, pendidikan tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan bangsa atau suatu proses pemerdakaan manusia, tetapi mulai bergeser menuju komodikasi pendidikan (Saksono,2008:106).

Komodikasi pendidikan terjadi dua perubahan orientasi dalam pendidikan nasional. Pertama, peranan negara untuk mencerdaskan warga semakin dikurangi dan digantikan oleh peranan pasar. Kedua, tujuan pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi tidak lagi

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih fokus untuk menghasilkan lulusan yang menguasai scientia, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bangsa, tetapi kurang membekali peserta didiknya dengan semangat kebangsaan, semangat keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga negara. Selama pemerintahan orde reformasi, pendidikan nasional mengalami tiga distorsi yang menyebabkan bidang tersebut tidak mampu mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau “meningkatkan keterdidikan” warga bangsa. Tiga distorsi itu adalah distorsi proses, distorsi mutu dan relevansi, dan distorsi pendekatan.

Semangat pendidikan yang memerdekakan (terutama untuk para siswa) yang oleh para pendiri Boedi Utomo telah dijadikan wahana untuk menghapus penjajahan dari bumi pertiwi tetap dipegang teguh. Semangat itu tercantum pada pembukaan UUD 1945 untuk dijadikan satuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai bangsa kita menyadari betapa *staatsfundamentalnorms* yang terkandung dalam pembukaan UUD serta ketentuan-ketentuan konstitusional yang mengatur hubungan negara dan warga dalam pendidikan telah menyimpang dalam pelaksanaannya.

Salah satu tuntutan gerakan reformasi

yang digerakan dari kampus-kampus pada 1998 adalah mengembalikan hubungan negara dan warga keatas rel yang benar dan lurus. Setelah beberapa waktu ini melaksanakan reformasi apakah tujuan pendidikan yang memerdekakan, atau dalam bahasan almarhum Romo Mangunwijaya, Pendidikan untuk meningkatkan harkat manusia telah mampu menciptakan warga indonesia yang “*Ora mlarat lan ora ningrat?*”. Semua bukti secara kasat mata menunjukkan pasca reformasi, sebagian besar rakyat, 49,1% masih tetap mlarat, karena berpendapatan dibawah PPD\$2 per-kapita perhari. Angka partisipasi pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah dari negara-negara tetangga, baru 62% penduduk usia 13- 18 tahun memiliki akses pendidikan menengah, dan 16% penduduk usia 19-24tahun memiliki akses pendidikan tinggi. Akses masyarakat desa dan masyarakat miskin pada air bersih dan sanitasi sehat masih rendah, pada tahun 2007 di Indonesia baru menduduki peringkat 111 dalam HDI ( *Human Development Index*), dan status kesehatan warga, dilihat dari angka harapan hidup, setingkat dengan negara-negara menengah yaitu 69,7 tahun. Tetapi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih ( *Good Governance*). (Soffian Effendi, 2008 dalam Saksono, 2008:107).

Perkembangan peringkat dalam HDI Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 : Perkembangan Kualitas Manusia Indonesia dan ASEAN diukur dari Ranking HDI**

Negara	Tahun			
	2000	2004	2007	2011
Singapore	22	25	23	26
Brunei Darussalam	25	34	30	33
Malaysia	56	61	66	61
Thailand	67	74	87	103
Filiphina	77	84	105	112
Indonesia	109	108	111	124

Sumber: Human Development Report, 2011

Dari data tersebut terindikasi bahwa peringkat Indonesia mengalami penurunan yang drastis dari peringkatnya pada tahun 2007 memperoleh peringkat 111 pada tahun 2011 berada pada posisi 124. Yang

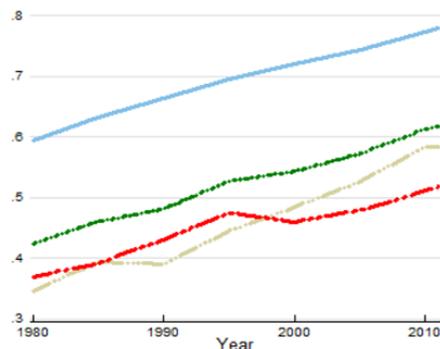
memprihatinkan adalah keberadaan negara Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya berada pada posisi terendah.

**Tabel 3: Trend HDI dengan Indicator Komponen**

	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Means years of schooling	GNI per capita (2005 PPP\$)	HDI value
1980	57,6	8,7	3,1	3,138	0,423
1985	60,0	10,1	3,5	1,539	0,460
1990	62,1	10,4	3,3	2,007	0,481
1995	64,0	10,5	4,2	2,751	0,527
2000	65,7	11,1	4,8	2,478	0,543
2005	67,1	11,8	5,3	2,840	0,572
2010	68,9	13,2	5,8	3,544	0,613
2011	69,4	13,2	5,8	3,716	0,617

Sumber: Human Development Resources, 2011

**Gambar 1. Trend Kenaikan HDI Indonesia**



Sumber: Human Development Resources

Indonesia, 2011

Perubahan yang terjadi begitu pesat, mulai bergesernya paradigma perubahan yang tidak lagi sesuai dengan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Soffian Effendy (dalam Saksono, 2008: 109) menyebutkan ada tiga distorsi yang terjadi pada pendidikan di Indonesia yaitu: pertama, distorsi proses. Melalui

kebijakan Ujian Nasional (UN) yang mengacaukan antara penilaian terhadap prestasi siswa dan evaluasi kurikulum. Kebijakan yang ada lebih pada melihat dari nilai evaluasi untuk menguji Compliance antara kurikulum sekolah dengan standar kurikulum nasional khususnya mata pelajaran yang diujikan. Kedua, distorsi mutu dan relevansi. Mutu pendidikan nasional jauh tertinggal dari mutu negara “maju” bahkan kalah dibandingkan dengan negara ASEAN (terutama Singapura, Malaysia, dan Muangthai). Pada negara ASEAN kebutuhan pendidikannya didasarkan pada sistem pendidikan yang sesuai dengan struktur kebutuhan industri. Sebagai contoh di Singapura, Korea, dan Taiwan terdapat 70-80% lulusan SLTA yang melanjutkan pendidikannya kejuruan dan pendidikan teknis, dan hanya 20-25% melanjutkan ke Universitas. Keadaan tadi berbanding terbalik dengan Indonesia. Ketiga, distorsi pendekatan. Pemerintah RI pasca-reformasi nampaknya amat terpesona oleh gelombang globalisasi yang menjanjikan akses lebar ke pasar global. Pemerintah kurang sadar kalau yang terbuka lebar adalah hubungan asimetris antara negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam besar dan jumlah manusia kurang terdidik dengan negara maju yang menguasai informasi, memiliki kemampuan kelembagaan, dan punya kemampuan negoisasi. Dalam

kondisi Triple asimetris, yaitu asimetri informasi, asimetri kelembagaan, dan asimetri negoisasi tersebut, globalisasi berarti menghadapkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam posisi yang mudah didominasi oleh Corporatice state yang kuat.

Melalui Hegemoni informasi, kelembagaan, dan negoisasi tersebut, negar-negara Corporatic melalui lembaga multilateral maupun bilateral telah mendiktekan kepentingan nasional atau lebih sempit kepentingan corporate mereka kepada negara-negara berkembang, termasuk Hegemoni of meaning atas konsep-konsep penting seperti demokrasi, yang ditunggalkan makna menjadi demokrasi liberal, ekonomi kapitalistik, pasar bebas, kepemilikan hak-hak intelektual, dan liberalisasi perdagangan termasuk perdagangan jasa.<sup>19</sup> Dengan diterbitkannya Perpres no.77 tahun 2007, pemerintah secara sadar maupun tidak telah melakukan perubahan total terhadap paradigma pendidikan nasional. Perubahan yang terjadi pada paradigma tersebut membawa 2 konsekuensi mendasar pada pendidikan nasional. Pertama pendidikan di redusir menjadi kegiatan komersial, menjadi “bidang usaha” yang terbuka untuk penanaman modal luar negeri walaupun dengan pembatasan modal luar negeri sebesar 49%. Kedua, pendidikan tidak lagi merupakan kewajiban konstitusional

pemerintah. 20 perubahan paradigma yang ada dalam bidang pendidikan ini tidak lepas dari pengaruh WTO ( World Trade Organization) yang menetapkan tiga kategori industri yaitu dari sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Pendidikan termasuk dalam sektor tersier sesuai pada penetapan WTO, karena kegiatan pokoknya ialah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak berketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang memiliki ketrampilan.

#### **PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITI YANG MENGUNTUNGAN**

Fenomena pendidikan saat ini tidak terlepas dari *profit* yang diraih oleh pengelola, jika pengelolaannya keluar dari jalur yang tertuang dalam naskah pembukaan UUD 1945. Sebagai contoh, beberapa negara yang menjadikan pendidikan sebagai komoditi profit adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, 2002: 104-105). Pada 200 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US \$ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Pada pendapatan nasional Inggris sumbangan ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4% dari total penerimaan sektor jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul *intelligent exports* mengungkapkan pada tahun 1994 sektor jasa telah

menyumbangkan 70% pada PDB Australia, mampu menyerap 80% tenaga kerja dan merupakan 20% dari ekspor total negara kangguru (Enders dan Fulton, 2002: 123).

#### **KESIMPULAN**

Sejarah pendidikan di Indonesia serta gambaran pendidikan di Indonesia setelah adanya era reformasi mengindikasikan bahwa telah terjadi keadaan yang 'berulang' antara masa kolonialisme dengan masa sekarang dimana tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan padahal telah jelas tercantum pada undang-undang pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun pada faktanya masih banyaknya jumlah anak yang putus sekolah dan meningkatkannya angka kemiskinan akibat rendahnya tingkat pendidikan.

Berdasarkan ciri politik pendidikan Belanda (Nasution, 2001), pendidikan Indonesia dapat digolongkan menjadi: [1]. *Gradualisme*, yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Tapi yang ada kini penyediaan pendidikan yang tidak merata pada anak desa dan perkotaan. Serta bebasnya swasta membuat sekolah yang berorientasi pada *market oriented*. [2] *Dualisme* dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Pada masa sekarang yang mengalami kesenjangan yang teramat

tajam adalah antar si kaya dan si miskin, ketika anak orang kaya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi dan memperoleh fasilitas baik sedangkan anak orang miskin hanya bersekolah semampunya dan terkadang meninggalkan bangku sekolah karena ketidakberadaan sistem yang ada. [3] *Kontrol sentral*. Kontrol yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap siapa saja murid yang dapat mengenyam pendidikan juga di alami pada era reformasi ini. Tetapi yang menjadi kontrol sentralnya adalah market, kemampuan daya beli akan pendidikan yang akan menjadi kontrol dan seleksi siapa saja yang dapat mengenyam pendidikan. [4] Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan. pada era reformasi yang ada kebutuhan industri tidak dijadikan dasar akan keberadaan suatu sistem pendidikan, sehingga persaingan yang terjadi adalah masuknya tenaga-tenaga kerja asing yang memiliki skill lebih dibandingkan tenaga-tenaga kerja lulusan Indonesia sehingga kita tersingkir keberadaannya di negara sendiri. [5] Prinsip konkordansi, yang menyebabkan maka sekolah di indonesia sama dengan di negeri belanda. Pada era reformasi dengan adanya keikutan sertaan WTO menciptakan pasar negara luatr akan pendidikan menjadikan pendidikan yang ada tidak

sesuai dengan nilai budaya dan sosial serta ekonomi yang diterapkan di negara kita. Dan [6] tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan pribumi. Hal ini juga sangat dirasakan pada era reformasi sehingga tidak adanya jaminan masa depan terhadap anak-anak yang telah lulus bersekolah terhadap kehidupan sosial ekonomi mereka, mengapa demikian pendidikan yang diciptakan pemerintah nhanya melihat dari segi kognitif saja tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan industri akan skill yang dimiliki oleh lulusan dunia pendidikan di Indonesia.

Dari keadaan ini dapat ditarik benang merah bahwa ada indikasi terjadinya kolonialisme babak *modern*. Dimana sistem pendidikan yang ada kembali berlandaskan kisah masa lalu. Sehingga keadaan ini mengikiskan terjadinya walfare state pada bidang pendidikan, yang terjadi malah kesenjangan yang semakin jauh antar anak bangsa.

### ***Rekomendasi Kebijakan***

Rekomendasi kebijakan yang akan penulis tawarkan dalam tulisan singkat ini adalah pemerataan jumlah sekolah dan tenaga pendidik, tingkatkan kualitas transportasi yang ada mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan. Mengapa jumlah sekolah yang merata? Sebab dengan adanya sekolah merata kita

telah mulai kembali pada landasan konstitusi yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” ketika jumlah sekolah tidak merata dan tenaga pendidikpun demikian maka yang menjadi landasan berubah menjadi “mencerdaskan kehidupan orang kota”. Ini suatu pernyataan ironi setelah mengenyam kemerdekaan 66 tahun 4 bulan 29 hari masih banyak pelosok negeri yang masih buta huruf. Mengapa penulis juga merekomendasikan peningkatan transportasi? Sebab ketika penulis kecil dan mendengar ada semboyan yang mengatakan “Buku adalah gudang ilmu”. Keberadaan sesuai dengan pengalaman yang ada ketika anak-anak pelosok yang berada dikalimantan daerah perbatasan darat dengan serawak tempat penulis tinggal tidak terdapat buku yang memadai, sehingga kualitas pendidikan yang ada antara di kota dan desa berbeda. Hal ini disebabkan karena transportasi yang sulit hanya ada satu jalan yaitu pesawat dan jadwal penerbangan pesawatpun tidak pasti sehingga menjadikan daerah pelosok menjadi daerah tertinggal dan kesejahteraan yang digemakan di kota sungguh sangat jauh dari perwujudannya terhadap kehidupan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2006
- Paskal Kleden pengantar Dr.I. Wibowo. *Menuju Tengah Baru “Labour Party Inggris dan SPD Jerman di Bawah Tekanan Neoliberalisme”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Nasution, S., *Sejarah pendidikan Indonesia*, PT.bumi aksara. Jakarta, 2001
- Saksono. Ign. Gatut. *Pendidikan yang Memerdekakan Siswa*. Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas. 2008